



**Judul** : Robert: ajak dulu masyarakat dialog  
**Tanggal** : Kamis, 24 November 2022  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 7

## Soal Kontrak BP Di Bintuni. Robert: Ajak Dulu Masyarakat Dialog

ANGGOTA Komisi X DPR Robert J Kardinal menyoroti rencana perpanjangan kontrak kerja sama (*Production Sharing Contract/PSC*) minyak dan gas bumi (migas) perusahaan raksasa Eropa, British Petroleum (BP).

Pemerintah diminta tidak tergesa-gesa memutuskan perpanjangan kontrak BP untuk Proyek Kilang LNG Tangguh di Teluk Bintuni, Papua Barat.

Robert bilang, kontrak berakhir pada 2035 mendatang, namun BP sudah meminta perpanjangan kontrak eksplorasi migas di Papua untuk 20 tahun berikutnya, yakni hingga 2055. Padahal, di kontrak itu sudah ada aturannya, kapan boleh perpanjangan lagi sebelum jatuh tempo.

"Kita mendukung (proyek migas), tapi sebelum Pemerintah memutuskan memperpanjang lagi, masyarakat bersama Pemerintah Daerah (Pemda) harus diajak bicara dulu," kata politisi Golkar daerah pemilihan Papua Barat ini.

Dia menilai, keberadaan BP dalam proyek LNG Tangguh berdampak ke masyarakat adat. Ini yang harus menjadi perhatian Pemerintah. Apakah masyarakat adat di sana sudah terpenuhi haknya dari BP sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus).

Dalam aturan tersebut jelas, perusahaan harus menggelontorkan 10 persen keuntungan bersihnya untuk masyarakat sekitar melalui program *Corporate Social Responsibility*

atau CSR.

"Dana CSR itu alirannya ke mana saja. Jangan cuma ambil gasnya di Bintuni, tetapi CSR-nya di tempat lain. Yang paling terkena dampaknya masyarakat sekitar situ," tegasnya.

Robert bilang, pemanfaatan dana CSR bisa menjadi salah satu program yang mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan Papua. Sebab, dana CSR ini bisa untuk membangun sekolah-sekolah, rumah sakit hingga infrastruktur di Papua Barat.

"CSR itu kewajiban. Misalnya, keuntungan bersih BP saja sebesar Rp 1 triliun, berarti kan CSR-nya itu 100 miliar. Ini kan bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan orang Papua," jelasnya.

Namun, dia menyayangkan perusahaan tambang asal Inggris ini belum maksimal dalam melakukan penyerapan tenaga kerja terhadap Orang Asli Papua (OAP).

Sebab, pekerja di LNG Tangguh justru mayoritas dari Jakarta dan luar Papua. Untuk itu, persoalan tenaga kerja ini harus jadi perhatian dalam menentukan kontrak BP di Bintuni.

"Lihat dulu komitmennya terhadap tenaga kerja ini. Dalam berapa tahun ke depan apa yang mereka lakukan tentang penerimaan tenaga kerja OAP. Itu harus dilaporkan berkala dan terbuka baik Pemerintah Pusat, daerah dan masyarakat," tegas eks Ketua Fraksi Golkar ini. ■ KAL